



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 366 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM
YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, rincian pagu bagian dana alokasi umum dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan per daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (5), Pasal 66 ayat (4), dan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, satuan biaya per kelurahan, besaran persentase bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya untuk masing-masing kategori terhadap pencapaian standar pelayanan minimal, dan kategori capaian kinerja daerah dan besaran persentase bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya untuk masing-masing kategori capaian kinerja daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan kebijakan pengalokasian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya pada tahun anggaran 2026, yang terdiri atas:

- a. dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. dukungan bidang pendidikan; dan
- c. dukungan bidang kesehatan.

KEDUA : Kebijakan pengalokasian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:

- a. satuan biaya dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran 2026 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap kelurahan; dan
- b. rincian pagu bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran 2026 untuk masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kebijakan pengalokasian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b berupa persentase bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang Pendidikan berdasarkan capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Kebijakan pengalokasian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c terdiri atas:
- a. indikator tingkat kinerja daerah bidang kesehatan dalam rangka penghitungan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang kesehatan tahun anggaran 2026 sebagai berikut:
 1. persentase melahirkan di fasilitas kesehatan;
 2. persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
 3. prevalensi *stunting*; dan
 4. capaian pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. persentase bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang kesehatan berdasarkan indikator tingkat kinerja daerah bidang kesehatan untuk wilayah provinsi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
 - c. persentase bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya dukungan bidang kesehatan berdasarkan indikator tingkat kinerja daerah bidang kesehatan untuk wilayah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 366 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM
YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN
ANGGARAN 2026

A. RINCIAN PAGU BAGIAN DANA ALOKASI UMUM DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PER DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi Aceh	0	0
2	Kab. Aceh Barat	0	0
3	Kab. Aceh Besar	0	0
4	Kab. Aceh Selatan	0	0
5	Kab. Aceh Singkil	0	0
6	Kab. Aceh Tengah	0	0
7	Kab. Aceh Tenggara	0	0
8	Kab. Aceh Timur	0	0
9	Kab. Aceh Utara	0	0
10	Kab. Bireuen	0	0
11	Kab. Pidie	0	0
12	Kab. Simeulue	0	0
13	Kota Banda Aceh	0	0
14	Kota Sabang	0	0
15	Kota Langsa	0	0
16	Kota Lhokseumawe	0	0
17	Kab. Gayo Lues	0	0
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	0
19	Kab. Aceh Jaya	0	0
20	Kab. Nagan Raya	0	0
21	Kab. Aceh Tamiang	0	0
22	Kab. Bener Meriah	0	0
23	Kab. Pidie Jaya	0	0
24	Kota Subulussalam	0	0
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0
26	Kab. Asahan	27	5.400.000.000
27	Kab. Dairi	8	1.600.000.000
28	Kab. Deli Serdang	14	2.800.000.000
29	Kab. Karo	10	2.000.000.000
30	Kab. Labuhanbatu	23	4.600.000.000
31	Kab. Langkat	37	7.400.000.000
32	Kab. Mandailing Natal	27	5.400.000.000
33	Kab. Nias	0	0
34	Kab. Simalungun	27	5.400.000.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	37	7.400.000.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	56	11.200.000.000
37	Kab. Tapanuli Utara	11	2.200.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Kab. Toba	13	2.600.000.000
39	Kota Binjai	37	7.400.000.000
40	Kota Medan	151	30.200.000.000
41	Kota Pematang Siantar	53	10.600.000.000
42	Kota Sibolga	17	3.400.000.000
43	Kota Tanjung Balai	31	6.200.000.000
44	Kota Tebing Tinggi	35	7.000.000.000
45	Kota Padang Sidempuan	37	7.400.000.000
46	Kab. Pakpak Bharat	0	0
47	Kab. Nias Selatan	2	400.000.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	1	200.000.000
49	Kab. Serdang Bedagai	6	1.200.000.000
50	Kab. Samosir	6	1.200.000.000
51	Kab. Batu Bara	10	2.000.000.000
52	Kab. Padang Lawas	1	200.000.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	2	400.000.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	2	400.000.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	8	1.600.000.000
56	Kab. Nias Utara	1	200.000.000
57	Kab. Nias Barat	0	0
58	Kota Gunungsitoli	3	600.000.000
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	0
61	Kab. Agam	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0
64	Kab. Pasaman	0	0
65	Kab. Pesisir Selatan	0	0
66	Kab. Sijunjung	0	0
67	Kab. Solok	0	0
68	Kab. Tanah Datar	0	0
69	Kota Bukit Tinggi	24	4.800.000.000
70	Kota Padang Panjang	16	3.200.000.000
71	Kota Padang	104	20.800.000.000
72	Kota Payakumbuh	47	9.400.000.000
73	Kota Sawahlunto	10	2.000.000.000
74	Kota Solok	13	2.600.000.000
75	Kota Pariaman	16	3.200.000.000
76	Kab. Pasaman Barat	0	0
77	Kab. Dharmasraya	0	0
78	Kab. Solok Selatan	0	0
79	Provinsi Riau	0	0
80	Kab. Bengkalis	19	3.800.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir	39	7.800.000.000
82	Kab. Indragiri Hulu	16	3.200.000.000
83	Kab. Kampar	8	1.600.000.000
84	Kab. Kuantan Singingi	11	2.200.000.000
85	Kab. Pelalawan	14	2.800.000.000
86	Kab. Rokan Hilir	25	5.000.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
87	Kab. Rokan Hulu	6	1.200.000.000
88	Kab. Siak	9	1.800.000.000
89	Kota Dumai	36	7.200.000.000
90	Kota Pekanbaru	83	16.600.000.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	5	1.000.000.000
92	Provinsi Jambi	0	0
93	Kab. Batang Hari	14	2.800.000.000
94	Kab. Bungo	12	2.400.000.000
95	Kab. Kerinci	2	400.000.000
96	Kab. Merangin	10	2.000.000.000
97	Kab. Muaro Jambi	5	1.000.000.000
98	Kab. Sarolangun	9	1.800.000.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	20	4.000.000.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	20	4.000.000.000
101	Kab. Tebo	7	1.400.000.000
102	Kota Jambi	68	13.600.000.000
103	Kota Sungai Penuh	4	800.000.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	0
105	Kab. Lahat	18	3.600.000.000
106	Kab. Musi Banyuasin	13	2.600.000.000
107	Kab. Musi Rawas	13	2.600.000.000
108	Kab. Muara Enim	10	2.000.000.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	13	2.600.000.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	14	2.800.000.000
111	Kota Palembang	107	21.400.000.000
112	Kota Prabumulih	33	6.600.000.000
113	Kota Pagar Alam	35	7.000.000.000
114	Kota Lubuk Linggau	72	14.400.000.000
115	Kab. Banyuasin	25	5.000.000.000
116	Kab. Ogan Ilir	14	2.800.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	7	1.400.000.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	7	1.400.000.000
119	Kab. Empat Lawang	9	1.800.000.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	6	1.200.000.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	7	1.400.000.000
122	Provinsi Bengkulu	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	16	3.200.000.000
124	Kab. Bengkulu Utara	5	1.000.000.000
125	Kab. Rejang Lebong	34	6.800.000.000
126	Kota Bengkulu	67	13.400.000.000
127	Kab. Kaur	3	600.000.000
128	Kab. Seluma	20	4.000.000.000
129	Kab. Mukomuko	3	600.000.000
130	Kab. Lebong	11	2.200.000.000
131	Kab. Kepahiang	12	2.400.000.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	1	200.000.000
133	Provinsi Lampung	0	0
134	Kab. Lampung Barat	5	1.000.000.000
135	Kab. Lampung Selatan	4	800.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
136	Kab. Lampung Tengah	10	2.000.000.000
137	Kab. Lampung Utara	15	3.000.000.000
138	Kab. Lampung Timur	0	0
139	Kab. Tanggamus	3	600.000.000
140	Kab. Tulang Bawang	4	800.000.000
141	Kab. Way Kanan	6	1.200.000.000
142	Kota Bandar Lampung	126	25.200.000.000
143	Kota Metro	22	4.400.000.000
144	Kab. Pesawaran	0	0
145	Kab. Pringsewu	5	1.000.000.000
146	Kab. Mesuji	0	0
147	Kab. Tulang Bawang Barat	3	600.000.000
148	Kab. Pesisir Barat	2	400.000.000
149	Provinsi DKI Jakarta	267	53.400.000.000
150	Provinsi Jawa Barat	0	0
151	Kab. Bandung	10	2.000.000.000
152	Kab. Bekasi	8	1.600.000.000
153	Kab. Bogor	19	3.800.000.000
154	Kab. Ciamis	7	1.400.000.000
155	Kab. Cianjur	6	1.200.000.000
156	Kab. Cirebon	12	2.400.000.000
157	Kab. Garut	21	4.200.000.000
158	Kab. Indramayu	8	1.600.000.000
159	Kab. Karawang	12	2.400.000.000
160	Kab. Kuningan	15	3.000.000.000
161	Kab. Majalengka	13	2.600.000.000
162	Kab. Purwakarta	9	1.800.000.000
163	Kab. Subang	8	1.600.000.000
164	Kab. Sukabumi	5	1.000.000.000
165	Kab. Sumedang	7	1.400.000.000
166	Kab. Tasikmalaya	0	0
167	Kota Bandung	151	30.200.000.000
168	Kota Bekasi	56	11.200.000.000
169	Kota Bogor	68	13.600.000.000
170	Kota Cirebon	22	4.400.000.000
171	Kota Depok	63	12.600.000.000
172	Kota Sukabumi	33	6.600.000.000
173	Kota Tasikmalaya	69	13.800.000.000
174	Kota Cimahi	15	3.000.000.000
175	Kota Banjar	9	1.800.000.000
176	Kab. Bandung Barat	0	0
177	Kab. Pangandaran	0	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0
179	Kab. Banjarnegara	12	2.400.000.000
180	Kab. Banyumas	30	6.000.000.000
181	Kab. Batang	9	1.800.000.000
182	Kab. Blora	24	4.800.000.000
183	Kab. Boyolali	6	1.200.000.000
184	Kab. Brebes	5	1.000.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
185	Kab. Cilacap	15	3.000.000.000
186	Kab. Demak	6	1.200.000.000
187	Kab. Grobogan	7	1.400.000.000
188	Kab. Jepara	11	2.200.000.000
189	Kab. Karanganyar	15	3.000.000.000
190	Kab. Kebumen	11	2.200.000.000
191	Kab. Kendal	20	4.000.000.000
192	Kab. Klaten	10	2.000.000.000
193	Kab. Kudus	9	1.800.000.000
194	Kab. Magelang	5	1.000.000.000
195	Kab. Pati	5	1.000.000.000
196	Kab. Pekalongan	13	2.600.000.000
197	Kab. Pemalang	11	2.200.000.000
198	Kab. Purbalingga	15	3.000.000.000
199	Kab. Purworejo	25	5.000.000.000
200	Kab. Rembang	7	1.400.000.000
201	Kab. Semarang	27	5.400.000.000
202	Kab. Sragen	12	2.400.000.000
203	Kab. Sukoharjo	17	3.400.000.000
204	Kab. Tegal	6	1.200.000.000
205	Kab. Temanggung	23	4.600.000.000
206	Kab. Wonogiri	43	8.600.000.000
207	Kab. Wonosobo	29	5.800.000.000
208	Kota Magelang	17	3.400.000.000
209	Kota Pekalongan	27	5.400.000.000
210	Kota Salatiga	23	4.600.000.000
211	Kota Semarang	177	35.400.000.000
212	Kota Surakarta	54	10.800.000.000
213	Kota Tegal	27	5.400.000.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0
215	Kab. Bantul	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0
217	Kab. Kulon Progo	1	200.000.000
218	Kab. Sleman	0	0
219	Kota Yogyakarta	45	9.000.000.000
220	Provinsi Jawa Timur	0	0
221	Kab. Bangkalan	8	1.600.000.000
222	Kab. Banyuwangi	28	5.600.000.000
223	Kab. Blitar	28	5.600.000.000
224	Kab. Bojonegoro	11	2.200.000.000
225	Kab. Bondowoso	10	2.000.000.000
226	Kab. Gresik	26	5.200.000.000
227	Kab. Jember	22	4.400.000.000
228	Kab. Jombang	4	800.000.000
229	Kab. Kediri	1	200.000.000
230	Kab. Lamongan	12	2.400.000.000
231	Kab. Lumajang	7	1.400.000.000
232	Kab. Madiun	8	1.600.000.000
233	Kab. Magetan	28	5.600.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
234	Kab. Malang	12	2.400.000.000
235	Kab. Mojokerto	5	1.000.000.000
236	Kab. Nganjuk	20	4.000.000.000
237	Kab. Ngawi	4	800.000.000
238	Kab. Pacitan	5	1.000.000.000
239	Kab. Pamekasan	11	2.200.000.000
240	Kab. Pasuruan	24	4.800.000.000
241	Kab. Ponorogo	26	5.200.000.000
242	Kab. Probolinggo	5	1.000.000.000
243	Kab. Sampang	6	1.200.000.000
244	Kab. Sidoarjo	28	5.600.000.000
245	Kab. Situbondo	4	800.000.000
246	Kab. Sumenep	4	800.000.000
247	Kab. Trenggalek	5	1.000.000.000
248	Kab. Tuban	17	3.400.000.000
249	Kab. Tulungagung	14	2.800.000.000
250	Kota Blitar	21	4.200.000.000
251	Kota Kediri	46	9.200.000.000
252	Kota Madiun	27	5.400.000.000
253	Kota Malang	57	11.400.000.000
254	Kota Mojokerto	18	3.600.000.000
255	Kota Pasuruan	34	6.800.000.000
256	Kota Probolinggo	29	5.800.000.000
257	Kota Surabaya	153	30.600.000.000
258	Kota Batu	5	1.000.000.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0
260	Kab. Bengkayang	2	400.000.000
261	Kab. Landak	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	4	800.000.000
263	Kab. Ketapang	9	1.800.000.000
264	Kab. Mempawah	7	1.400.000.000
265	Kab. Sambas	0	0
266	Kab. Sanggau	6	1.200.000.000
267	Kab. Sintang	16	3.200.000.000
268	Kota Pontianak	29	5.800.000.000
269	Kota Singkawang	26	5.200.000.000
270	Kab. Sekadau	0	0
271	Kab. Melawi	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0
275	Kab. Barito Selatan	7	1.400.000.000
276	Kab. Barito Utara	10	2.000.000.000
277	Kab. Kapuas	17	3.400.000.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	13	2.600.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	17	3.400.000.000
280	Kota Palangkaraya	30	6.000.000.000
281	Kab. Katingan	7	1.400.000.000
282	Kab. Seruyan	3	600.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
283	Kab. Sukamara	3	600.000.000
284	Kab. Lamandau	3	600.000.000
285	Kab. Gunung Mas	13	2.600.000.000
286	Kab. Pulang Pisau	4	800.000.000
287	Kab. Murung Raya	9	1.800.000.000
288	Kab. Barito Timur	3	600.000.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0
290	Kab. Banjar	13	2.600.000.000
291	Kab. Barito Kuala	6	1.200.000.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	4	800.000.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	8	1.600.000.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	5	1.000.000.000
295	Kab. Kotabaru	4	800.000.000
296	Kab. Tabalong	10	2.000.000.000
297	Kab. Tanah Laut	5	1.000.000.000
298	Kab. Tapin	9	1.800.000.000
299	Kota Banjarbaru	20	4.000.000.000
300	Kota Banjarmasin	52	10.400.000.000
301	Kab. Balangan	3	600.000.000
302	Kab. Tanah Bumbu	5	1.000.000.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0
304	Kab. Berau	10	2.000.000.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	44	8.800.000.000
306	Kab. Kutai Barat	4	800.000.000
307	Kab. Kutai Timur	2	400.000.000
308	Kab. Paser	5	1.000.000.000
309	Kota Balikpapan	34	6.800.000.000
310	Kota Bontang	15	3.000.000.000
311	Kota Samarinda	59	11.800.000.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	24	4.800.000.000
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	2	400.000.000
316	Kab. Minahasa	43	8.600.000.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe	22	4.400.000.000
318	Kota Bitung	69	13.800.000.000
319	Kota Manado	87	17.400.000.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	11	2.200.000.000
321	Kab. Minahasa Selatan	10	2.000.000.000
322	Kota Tomohon	44	8.800.000.000
323	Kab. Minahasa Utara	6	1.200.000.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10	2.000.000.000
325	Kota Kotamobagu	18	3.600.000.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	200.000.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	9	1.800.000.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0
331	Kab. Banggai	46	9.200.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
332	Kab. Banggai Kepulauan	3	600.000.000
333	Kab. Buol	7	1.400.000.000
334	Kab. Toli-Toli	6	1.200.000.000
335	Kab. Donggala	9	1.800.000.000
336	Kab. Morowali	7	1.400.000.000
337	Kab. Poso	28	5.600.000.000
338	Kota Palu	46	9.200.000.000
339	Kab. Parigi Moutong	5	1.000.000.000
340	Kab. Tojo Una Una	12	2.400.000.000
341	Kab. Sigi	0	0
342	Kab. Banggai Laut	3	600.000.000
343	Kab. Morowali Utara	3	600.000.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0
345	Kab. Bantaeng	21	4.200.000.000
346	Kab. Barru	15	3.000.000.000
347	Kab. Bone	44	8.800.000.000
348	Kab. Bulukumba	27	5.400.000.000
349	Kab. Enrekang	17	3.400.000.000
350	Kab. Gowa	46	9.200.000.000
351	Kab. Jeneponto	31	6.200.000.000
352	Kab. Luwu	20	4.000.000.000
353	Kab. Luwu Utara	7	1.400.000.000
354	Kab. Maros	23	4.600.000.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	38	7.600.000.000
356	Kota Palopo	48	9.600.000.000
357	Kab. Luwu Timur	3	600.000.000
358	Kab. Pinrang	40	8.000.000.000
359	Kab. Sinjai	13	2.600.000.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	7	1.400.000.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	38	7.600.000.000
362	Kab. Soppeng	21	4.200.000.000
363	Kab. Takalar	24	4.800.000.000
364	Kab. Tana Toraja	47	9.400.000.000
365	Kab. Wajo	48	9.600.000.000
366	Kota Pare-pare	22	4.400.000.000
367	Kota Makassar	153	30.600.000.000
368	Kab. Toraja Utara	40	8.000.000.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0
370	Kab. Buton	12	2.400.000.000
371	Kab. Konawe	57	11.400.000.000
372	Kab. Kolaka	35	7.000.000.000
373	Kab. Muna	26	5.200.000.000
374	Kota Kendari	65	13.000.000.000
375	Kota Bau-bau	43	8.600.000.000
376	Kab. Konawe Selatan	15	3.000.000.000
377	Kab. Bombana	22	4.400.000.000
378	Kab. Wakatobi	25	5.000.000.000
379	Kab. Kolaka Utara	6	1.200.000.000
380	Kab. Konawe Utara	11	2.200.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
381	Kab. Buton Utara	12	2.400.000.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	7	1.400.000.000
383	Kab. Kolaka Timur	16	3.200.000.000
384	Kab. Muna Barat	5	1.000.000.000
385	Kab. Buton Tengah	10	2.000.000.000
386	Kab. Buton Selatan	10	2.000.000.000
387	Provinsi Bali	0	0
388	Kab. Badung	16	3.200.000.000
389	Kab. Bangli	4	800.000.000
390	Kab. Buleleng	19	3.800.000.000
391	Kab. Gianyar	6	1.200.000.000
392	Kab. Jembrana	10	2.000.000.000
393	Kab. Karangasem	3	600.000.000
394	Kab. Klungkung	6	1.200.000.000
395	Kab. Tabanan	0	0
396	Kota Denpasar	16	3.200.000.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0
398	Kab. Bima	0	0
399	Kab. Dompu	9	1.800.000.000
400	Kab. Lombok Barat	3	600.000.000
401	Kab. Lombok Tengah	12	2.400.000.000
402	Kab. Lombok Timur	15	3.000.000.000
403	Kab. Sumbawa	8	1.600.000.000
404	Kota Mataram	50	10.000.000.000
405	Kota Bima	41	8.200.000.000
406	Kab. Sumbawa Barat	7	1.400.000.000
407	Kab. Lombok Utara	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0
409	Kab. Alor	17	3.400.000.000
410	Kab. Belu	12	2.400.000.000
411	Kab. Ende	23	4.600.000.000
412	Kab. Flores Timur	21	4.200.000.000
413	Kab. Kupang	17	3.400.000.000
414	Kab. Lembata	7	1.400.000.000
415	Kab. Manggarai	26	5.200.000.000
416	Kab. Ngada	16	3.200.000.000
417	Kab. Sikka	13	2.600.000.000
418	Kab. Sumba Barat	11	2.200.000.000
419	Kab. Sumba Timur	16	3.200.000.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	12	2.400.000.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	11	2.200.000.000
422	Kota Kupang	51	10.200.000.000
423	Kab. Rote Ndao	7	1.400.000.000
424	Kab. Manggarai Barat	5	1.000.000.000
425	Kab. Nagekeo	16	3.200.000.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	2	400.000.000
427	Kab. Sumba Tengah	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	17	3.400.000.000
429	Kab. Sabu Raijua	5	1.000.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
430	Kab. Malaka	0	0
431	Provinsi Maluku	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	2	400.000.000
433	Kab. Maluku Tengah	6	1.200.000.000
434	Kab. Maluku Tenggara	1	200.000.000
435	Kab. Buru	0	0
436	Kota Ambon	20	4.000.000.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	0
439	Kab. Kepulauan Aru	2	400.000.000
440	Kota Tual	3	600.000.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	1	200.000.000
442	Kab. Buru Selatan	0	0
443	Provinsi Papua	0	0
444	Kab. Biak Numfor	14	2.800.000.000
445	Kab. Jayapura	5	1.000.000.000
446	Kab. Kepulauan Yapen	5	1.000.000.000
447	Kota Jayapura	25	5.000.000.000
448	Kab. Sarmi	2	400.000.000
449	Kab. Keerom	0	0
450	Kab. Waropen	0	0
451	Kab. Supiori	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0
455	Kota Ternate	78	15.600.000.000
456	Kab. Halmahera Barat	0	0
457	Kab. Halmahera Timur	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0
461	Kota Tidore Kepulauan	40	8.000.000.000
462	Kab. Pulau Morotai	0	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0
464	Provinsi Banten	0	0
465	Kab. Lebak	5	1.000.000.000
466	Kab. Pandeglang	13	2.600.000.000
467	Kab. Serang	0	0
468	Kab. Tangerang	28	5.600.000.000
469	Kota Cilegon	43	8.600.000.000
470	Kota Tangerang	104	20.800.000.000
471	Kota Serang	67	13.400.000.000
472	Kota Tangerang Selatan	54	10.800.000.000
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0
474	Kab. Bangka	19	3.800.000.000
475	Kab. Belitung	7	1.400.000.000
476	Kota Pangkal Pinang	42	8.400.000.000
477	Kab. Bangka Selatan	3	600.000.000
478	Kab. Bangka Tengah	7	1.400.000.000

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
479	Kab. Bangka Barat	6	1.200.000.000
480	Kab. Belitung Timur	0	0
481	Provinsi Gorontalo	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0
483	Kab. Gorontalo	14	2.800.000.000
484	Kota Gorontalo	50	10.000.000.000
485	Kab. Pohuwato	3	600.000.000
486	Kab. Bone Bolango	5	1.000.000.000
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0
489	Kab. Natuna	7	1.400.000.000
490	Kab. Kepulauan Anambas	2	400.000.000
491	Kab. Karimun	29	5.800.000.000
492	Kota Batam	64	12.800.000.000
493	Kota Tanjung Pinang	18	3.600.000.000
494	Kab. Lingga	9	1.800.000.000
495	Kab. Bintan	15	3.000.000.000
496	Provinsi Papua Barat	0	0
497	Kab. Fak Fak	7	1.400.000.000
498	Kab. Manokwari	9	1.800.000.000
499	Kab. Teluk Bintuni	2	400.000.000
500	Kab. Teluk Wondama	1	200.000.000
501	Kab. Kaimana	2	400.000.000
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0
505	Kab. Majene	20	4.000.000.000
506	Kab. Mamuju	13	2.600.000.000
507	Kab. Polewali Mandar	23	4.600.000.000
508	Kab. Mamasa	13	2.600.000.000
509	Kab. Pasangkayu	4	800.000.000
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0
512	Kab. Bulungan	7	1.400.000.000
513	Kab. Malinau	0	0
514	Kab. Nunukan	8	1.600.000.000
515	Kota Tarakan	20	4.000.000.000
516	Kab. Tana Tidung	0	0
517	Provinsi Papua Selatan	0	0
518	Kab. Merauke	11	2.200.000.000
519	Kab. Boven Digoel	0	0
520	Kab. Mappi	2	400.000.000
521	Kab. Asmat	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0
523	Kab. Mimika	19	3.800.000.000
524	Kab. Nabire	9	1.800.000.000
525	Kab. Paniai	5	1.000.000.000
526	Kab. Puncak Jaya	3	600.000.000
527	Kab. Dogiyai	0	0

No	Daerah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Alokasi (dalam Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
528	Kab. Puncak	0	0
529	Kab. Intan Jaya	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0
532	Kab. Jayawijaya	4	800.000.000
533	Kab. Yahukimo	1	200.000.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0
535	Kab. Tolikara	4	800.000.000
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	1	200.000.000
539	Kab. Nduga	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0
541	Kab. Sorong	26	5.200.000.000
542	Kota Sorong	41	8.200.000.000
543	Kab. Raja Ampat	4	800.000.000
544	Kab. Sorong Selatan	2	400.000.000
545	Kab. Maybrat	1	200.000.000
546	Kab. Tambrau	0	0
	JUMLAH NASIONAL	8.496	1.699.200.000.000

B. PERSENTASE BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

No	Nilai Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Kelompok	Porsi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
1.	100	Tuntas Paripurna	0%
2.	90 s.d. < 100	Tuntas Utama	0%
3.	80 s.d. < 90	Tuntas Madya	0%
4.	70 s.d. < 80	Tuntas Pratama	5%
5.	60 s.d. < 70	Tuntas Muda	10%
6.	Kurang dari 60	Belum Tuntas	15%

C. PERSENTASE BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH BIDANG KESEHATAN UNTUK WILAYAH PROVINSI

No	Nilai Indeks Kinerja Bidang Kesehatan	Kelompok	Porsi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
1.	97,31 s.d. 100	Sangat Baik	0%
2.	91,21 s.d. < 97,31	Baik	0%
3.	87,19 s.d. < 91,21	Sedang	5%
4.	80,71 s.d. < 87,19	Kurang	10%
5.	Kurang dari 80,71	Sangat Kurang	15%

Keterangan:
Rentang nilai indeks kinerja bidang kesehatan menggunakan acuan angka rentang nilai indeks kinerja bidang kesehatan untuk wilayah provinsi yang digunakan pada pengalokasian dana alokasi umum tahun anggaran 2025.

D. PERSENTASE BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH BIDANG KESEHATAN UNTUK WILAYAH KABUPATEN/KOTA

No	Nilai Indeks Kinerja Bidang Kesehatan	Kelompok	Porsi Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya
1.	96,21 s.d. 100	Sangat Baik	0%
2.	88,83 s.d. < 96,21	Baik	0%
3.	83,44 s.d. < 88,83	Sedang	5%
4.	76,63 s.d. < 83,44	Kurang	10%
5.	Kurang dari 76,63	Sangat Kurang	15%

Keterangan:
Rentang nilai indeks kinerja bidang kesehatan menggunakan acuan angka rentang nilai indeks kinerja bidang kesehatan untuk wilayah kabupaten/kota yang digunakan pada pengalokasian dana alokasi umum tahun anggaran 2025.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA

